



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 374 /KEP/HK/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/19647/Keuda tanggal 8 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-286/PK/PK.5/2023 tanggal 8 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Desember 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
7. Bupati Sumba Barat di Waikabubak.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Re
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	f

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 374 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 11 Desember 2024****TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
		<p>Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	



	<p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.</p>	<p>Mengingat: Ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 	<p><i>Urutan angka disesuaikan.</i></p>
	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 49;</p>	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Tetap.</p>	
	<p>Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: Huruf a s/d huruf r.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p><i>Tidak sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</i></p>
	<p>Pasal 3 Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi: Huruf a s/d huruf i.</p>	<p>Pasal 3 Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi: Tetap.</p>	
	<p>Pasal 4 Ayat (1) s/d ayat (5)</p>	<p>Pasal 4 Tetap.</p>	
	<p>Pasal 5</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 6</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 7</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 8</p>	<p>Tetap.</p>	

fa

		Pasal 9	Tetap.	
		Pasal 10	Tetap.	
		Pasal 11	Tetap.	
		Pasal 12	Tetap.	
		Pasal 13	Tetap.	
		Pasal 14	Tetap.	
		Pasal 15	Tetap.	
		Pasal 16	Tetap.	
		Pasal 17	Tetap.	
		Pasal 18	Tetap.	
		Pasal 19	Tetap.	
		Pasal 20	Tetap.	
		Pasal 21 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
			Pasal 21	
			Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:	
			(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris sesuai kewenangannya wajib:	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan	
			b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	
			(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau	
			b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	

f

			(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 22 Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.	Pasal 22
		Pasal 23	Tetap.	
		Pasal 24 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 24
		Pasal 25 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 25
		Pasal 26 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 26
		Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 27
		Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 28
		Pasal 29 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 29

			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		Pasal 30 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 30
		Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 31
		Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 32
		Pasal 33	Tetap.	
		Pasal 34	Tetap.	
		Pasal 35 Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	Pasal 35
		Pasal 36 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 36
		Pasal 37 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 37
		Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 38
		Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 39
		Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 40
		Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 41
		Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 42

	Pasal 29 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 29	
			Pasal ... (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 30 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 30	
	Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 31	
	Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 32	
	Pasal 33	Tetap.		
	Pasal 34	Tetap.		
	Pasal 35 Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	Pasal 35	
	Pasal 36 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 36	
	Pasal 37 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 37	
	Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 38	
	Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 39	
	Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 40	
	Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 41	
	Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 42	

		Pasal 43 Ayat (1) s/d ayat (2).	Tetap.	Pasal 43	
		Pasal 44	Tetap.		
		Pasal 45	Tetap.		
		Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 46	
		Pasal 47 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 47	
		Pasal 48	Tetap.		
		Pasal 49	Tetap.		
		Pasal 50	Tetap.		
		Pasal 51	Tetap.		
		Pasal 52	Tetap.		
		Pasal 53	Tetap.		
		Pasal 54	Tetap.		
		Pasal 55 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 55	
		Pasal 56	Tetap.		
		Pasal 57	Tetap.		
		Pasal 58 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 58	
		Pasal 59	Tetap.		
		Pasal 60	Tetap.		
		Pasal 61	Tetap.		
		Pasal 62	Tetap.		
		Pasal 63	Tetap.		
		Pasal 64 Ayat (1).	Ketentuan Pasal 64 Ditambahkan 1 (satu) ayat baru menjadi: Tetap. (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).		
		Pasal 65	Tetap.		
		Pasal 66	Tetap.		

h

	Pasal 67	Tetap.	
	Pasal 68		Pasal 68
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 69	Tetap.	
	Pasal 70	Tetap.	
	Pasal 71	Tetap.	
	Pasal 72	Tetap.	
	Pasal 73	Tetap.	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Tetap.	
	Pasal 76	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Tetap.	
	Pasal 79	Tetap.	
	Pasal 80	Tetap.	
	Pasal 81	Tetap.	
	Pasal 82		Pasal 82
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 83		Pasal 83
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 84		Pasal 84
	Ayat (1)	Tetap.	
	(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Huruf a s/d huruf d. e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.	Tetap. a. Tetap. b. Tetap c. Tetap. d. Tetap. Dihapus.	

			<p>Diantara Bab IX dan Bab X ditambahkan Bab baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN. Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada <u>Pasal ... ayat ...</u>, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p>	
			<p>(4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada <u>Pasal ... ayat ...</u>, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada <u>Pasal ... ayat ...</u>, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>(6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ..., ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	

			<p>(7) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(9) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(10) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penanaman pohon; 2. pembuatan lubang atau sumur resapan; 3. pelestarian hutan atau pepohonan; dan 4. pengelolaan limbah. 5. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 6. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 7. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. <p>(11) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(12) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. <p>(13) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ... <p>(14) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ... dst <p>(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 	
--	--	--	--	--

			<p>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p> <p>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</p> <p>(16) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	
			<p>(17) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(18) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <p>a. bencana alam;</p> <p>b. kebakaran;</p> <p>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</p> <p>d. wabah penyakit; dan/atau</p> <p>e.</p> <p>(19) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
			<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	

			<p>(4) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(5) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p>	
			<p>(6) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(7) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Ayat (1). (2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Huruf e</p>	<p>Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf e dihapus menjadi: Pasal 84</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap.</p> <p>Dihapus.</p>	<p><i>Tidak sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</i></p>

		Pasal 85	Tetap.	
		Pasal 86	Tetap.	
		Pasal 87	Tetap.	
		Pasal 88	Tetap.	
		Pasal 89	Tetap.	
		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
		Pasal 92		Pasal 92
		Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 93		Pasal 93
		Ayat (1) s/d ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 94		Pasal 94
		Ayat (1) dan ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 95		Pasal 95
		Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	
		Pasal 96		Pasal 96
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 97		Pasal 97
		Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
		Pasal 98	Tetap.	
		Pasal 99	Tetap.	
		Pasal 100	Ketentuan Pasal 100 disarankan ditinjau kembali. Tetap.	Ketentuan tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas pada Ranperda ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1)

				Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
		Pasal 101 Ayat (1) s/d ayat (7).	Ketentuan Pasal 101 huruf b, huruf f, huruf g dan Huruf h agar ditinjau kembali jika memang tidak terdapat potensi disarankan dihapus. Tetap.	Pasal 101 Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 102
		Pasal 103 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 103
		Pasal 104	Tetap.	
		Pasal 105	Tetap.	
		Pasal 106	Tetap.	
		Pasal 107	Tetap.	
		Pasal 108	Tetap.	
		Pasal 109	Tetap.	
		Pasal 110	Tetap.	

		<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Ayat (1). (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Huruf a s/d huruf d.</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 111 ayat (2) disempurnakan dan ayat (3) dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi: Huruf a dan huruf b. c. pengelolaan pertambangan rakyat</p>	<p>Ketentuan Pasal 112 huruf c dihapus menjadi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>

		Pasal 113 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 113	
		Pasal 114 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 114	
		Pasal 115 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 115	
		Pasal 116 Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.	Pasal 116	
		Pasal 117 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 117	
		Pasal 118 Ayat (1) dan Ayat (6).	Tetap.	Pasal 118	
		Pasal 119 (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap.	Ketentuan Pasal 119 dihapus sehingga menjadi: Pasal 119	
		(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Huruf a dan huruf b.	Dihapus.		

		<p>Pasal 120 Ayat (1) s/d ayat (4). Ayat (5)</p>	<p>Ketentuan Pasal 120 ayat (5) dihapus menjadi: Pasal 120</p> <p>Tetap. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>
		<p>Pasal 121 Ayat (1) s/d ayat (9).</p>	<p>Tetap.</p>	<p>Pasal 121</p>
		<p>Pasal 122 Ayat (1) s/d ayat (3).</p>	<p>Tetap.</p>	<p>Pasal 122</p>
		<p>Pasal 123 Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Tetap.</p>	<p>Pasal 123</p>
		<p>Pasal 124 Ayat (1) s/d ayat (4)</p>	<p>Tetap.</p>	<p>Pasal 124</p>
		<p>Pasal 125 Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Tetap.</p>	<p>Pasal 125</p>
		<p>Pasal 126</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 127</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 128</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Pasal 129 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Huruf a. Huruf b. Huruf c.</p>	<p>Ketentuan Pasal 129 huruf b dihapus menjadi: Pasal 129</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Tetap. b. Dihapus. c. Tetap.</p>	

			<p>Diantara Pasal 129 dan Pasal 130 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2025.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	
		Pasal 130	Tetap.	
		Pasal 131	Tetap.	
		Pasal 132	Tetap.	
		Pasal 133	Tetap.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN;</p> <p>1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT</p> <p>A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Waikabubak :</p> <p>I. Loker dan Pendaftaran</p> <p>1. Rawat Jalan</p> <p>a. Pelayanan Poliklinik Umum</p> <p>a. Pelayanan Rawat Jalan</p>	<p>A. PELAYANAN KESEHATAN;</p> <p>1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT</p> <p><i>Dihapus.</i></p> <p>a. Pelayanan Rawat Jalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. - Teks/tulisan yang diwarnai biru tercantum pada matriks evaluasi yang disampaikan Pemda namun tidak terdapat dalam lampiran tarif Raperda. - Mengingat terdapat perbedaan antara struktur dan besaran tarif antara muatan dalam matriks dan lampiran Raperda, Pemda perlu memutuskan layanan dan tarif mana yang akan ditetapkan dalam Perda. - Pemda perlu menentukan dan menambahkan satuan pelayanan yang sesuai/relevan dengan layanan yang disediakan untuk merepresentasikan tingkat penggunaan jasa atas setiap layanan.
		<p>b. Pelayanan Poli Gigi dan Dokter Umum Gigi < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>c. Pelayanan Poli Anak</p> <p>d. Pelayanan Poli Bedah < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>e. Pelayanan poli kebidanan dan kandungan < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>f. Pelayanan Poli Interna < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>g. Pelayanan Poli Jantung < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>h. Pelayanan Poli Mata < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>i. Pelayanan Poli THT < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>j. Pelayanan Poli Fisioterapi < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>k. Poli Paru < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p>	<p>Ditambahkan kolom satuan sebagaimana contoh tabel rekomendasi sebelumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. - Teks/tulisan yang diwarnai biru tercantum pada matriks evaluasi yang disampaikan Pemda namun tidak terdapat dalam lampiran tarif Raperda. - Mengingat terdapat perbedaan antara struktur dan besaran tarif antara muatan dalam matriks dan lampiran Raperda, Pemda perlu memutuskan layanan dan tarif mana yang akan ditetapkan dalam Perda. - Pemda perlu menentukan dan menambahkan satuan pelayanan yang sesuai/relevan dengan layanan yang disediakan untuk merepresentasikan tingkat penggunaan jasa atas setiap layanan.

i. Pelayanan Rawat Jalan Lainnya

- a. Gizi
< tabel tarif tanpa kolom satuan >
- b. Pelayanan Psikologi
< tabel tarif tanpa kolom satuan >
- c. Pelayanan Hemodialisa
< tabel tarif tanpa kolom satuan >

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	JASA	
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)
1	Nebulisasi	70.000,00	47.600,00	22.400,00
2	Imunisasi	Gratis	0,00	0,00

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan		
		No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	JASA		No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	JASA		Satuan	
					Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)				Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)		
		1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	12.000,00	8.160,00	3.840,00	1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	12.000,00	8.160,00	3.840,00	Per	
		2	Tindakan esktraksi corpal hidung	30.000,00	20.400,00	9.600,00	2	Tindakan esktraksi corpal hidung	30.000,00	20.400,00	9.600,00	Per	
		3	Tindakan ekstraksi corpal telinga	40.000,00	27.200,00	12.800,00	3	Tindakan ekstraksi corpal telinga	40.000,00	27.200,00	12.800,00	Per	
		4	Tindakan Laringoskopi	89.500,00	60.860,00	28.640,00	4	Tindakan Laringoskopi	89.500,00	60.860,00	28.640,00	Per	
		5	Tindakan Rhinoskopi	24.000,00	16.320,00	7.680,00	5	Tindakan Rhinoskopi	24.000,00	16.320,00	7.680,00	Per	
		6	Tindakan Otoskopi	24.000,00	16.320,00	7.680,00	6	Tindakan Otoskopi	24.000,00	16.320,00	7.680,00	Per	
		7	Tindakan Epilasi	60.000,00	40.800,00	19.200,00	7	Tindakan Epilasi	60.000,00	40.800,00	19.200,00	Per	
		8	Tindakan Epistaksis	30.000,00	20.400,00	9.600,00	8	Tindakan Epistaksis	30.000,00	20.400,00	9.600,00	Per	
		9	Tindakan irigasi telinga	30.000,00	20.400,00	9.600,00	9	Tindakan irigasi telinga	30.000,00	20.400,00	9.600,00	Per	
		10	Imunisasi Hb O	12.000,00	8.160,00	3.840,00	10	Imunisasi Hb O	12.000,00	8.160,00	3.840,00	Per	
		11	Pemeriksaan buta warna	36.000,00	24.480,00	11.520,00	11	Pemeriksaan buta warna	36.000,00	24.480,00	11.520,00	Per	
		12	Pemeriksaan Refraksi	33.000,00	22.440,00	10.560,00	12	Pemeriksaan Refraksi	33.000,00	22.440,00	10.560,00	Per	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2. Instalasi Gawat Darurat			-	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.
	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	JASA		
				Sarana (Rp) Pelayanan (Rp)		
	1	Amputasi Jari	180.000,00	122.400,00 57.600,00		
	2	Atropinisasi	20.000,00	13.600,00 6.400,00		
	3	Bandage Ekstrimitas Atas	30.000,00	20.400,00 9.600,00		
	4	Dst. s.d. 63. RJP dengan DC Shock				
		RJP tanpa DC Shock	300.000,00	204.000,00 96.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																					
		<p>3. Rawat Inap a. Biaya Kamar Rawat Inap (tidak termasuk konsul dokter dan obat-obatan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelas</th> <th rowspan="2">Tarif/ Akomodasi</th> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>325.000,00</td> <td>221.000,00</td> <td>104.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>325.000,00</td> <td>221.000,00</td> <td>104.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>150.000,00</td> <td>102.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>88.500,00</td> <td>60.180,00</td> <td>28.320,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>59.000,00</td> <td>40.120,00</td> <td>18.880,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td>150.000,00</td> <td>102.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelas</th> <th colspan="3">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th>Dokter Ahli</th> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>118.000,00</td> <td>80.240,00</td> <td>37.760,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>88.500,00</td> <td>60.180,00</td> <td>28.320,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>47.200,00</td> <td>32.096,00</td> <td>15.104,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>29.500,00</td> <td>20.060,00</td> <td>9.440,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>23.600,00</td> <td>16.048,00</td> <td>7.552,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td>118.000,00</td> <td>80.240,00</td> <td>37.760,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Tarif/ Akomodasi	JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	325.000,00	221.000,00	104.000,00	2	VIP	325.000,00	221.000,00	104.000,00	3	Kelas I	150.000,00	102.000,00	48.000,00	4	Kelas II	88.500,00	60.180,00	28.320,00	5	Kelas III	59.000,00	40.120,00	18.880,00	6	Isolasi	150.000,00	102.000,00	48.000,00	No	Kelas	Visite/Konsul			Dokter Ahli	JASA					Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	118.000,00	80.240,00	37.760,00	2	VIP	88.500,00	60.180,00	28.320,00	3	Kelas I	47.200,00	32.096,00	15.104,00	4	Kelas II	29.500,00	20.060,00	9.440,00	5	Kelas III	23.600,00	16.048,00	7.552,00	6	Isolasi	118.000,00	80.240,00	37.760,00	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif yang akan diterapkan harus diputuskan dan ditetapkan dalam Perda. - Tabel tarif Ditambahkan kolom satuan sebagaimana contoh tabel rekomendasi sebelumnya. - Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Kamar Rawat Inap (tidak termasuk konsul dokter dan obat-obatan) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelas</th> <th rowspan="2">Tarif/ Akomodasi</th> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>550.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>400.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>213.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>150.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>119.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Observasi IGD/VK/Anak</td> <td>210.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ruang Perawatan Isolasi</td> <td>210.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Recovery Room</td> <td>210.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelas</th> <th colspan="3">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th>Dokter Ahli</th> <th>JASA Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>118.000,00</td> <td>80.240,00</td> <td>37.760,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>xxx</td> <td>60.180</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>xxx</td> <td>32.096</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>xxx</td> <td>20.060</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>xxx</td> <td>16.048</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td>xxx</td> <td>80.240</td> <td>xxx</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Tarif/ Akomodasi	JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	550.000,00			2	VIP	400.000,00			3	Kelas I	213.000,00			4	Kelas II	150.000,00			5	Kelas III	119.000,00			6	Observasi IGD/VK/Anak	210.000			7	Ruang Perawatan Isolasi	210.000			8	Recovery Room	210.000			No	Kelas	Visite/Konsul			Dokter Ahli	JASA Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	118.000,00	80.240,00	37.760,00	2	VIP	xxx	60.180	xxx	3	Kelas I	xxx	32.096	xxx	4	Kelas II	xxx	20.060	xxx	5	Kelas III	xxx	16.048	xxx	6	Isolasi	xxx	80.240	xxx	<ul style="list-style-type: none"> - Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. - Teks/tulisan yang diwarnai biru tercantum pada matriks evaluasi yang disampaikan Pemda namun tidak terdapat dalam lampiran tarif Raperda. - Mengingat terdapat perbedaan antara struktur dan besaran tarif antara muatan dalam matriks dan lampiran Raperda, Pemda perlu memutuskan layanan dan tarif mana yang akan ditetapkan dalam Perda.
No	Kelas	Tarif/ Akomodasi				JASA																																																																																																																																																																			
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																					
1	ICU/NICU	325.000,00	221.000,00	104.000,00																																																																																																																																																																					
2	VIP	325.000,00	221.000,00	104.000,00																																																																																																																																																																					
3	Kelas I	150.000,00	102.000,00	48.000,00																																																																																																																																																																					
4	Kelas II	88.500,00	60.180,00	28.320,00																																																																																																																																																																					
5	Kelas III	59.000,00	40.120,00	18.880,00																																																																																																																																																																					
6	Isolasi	150.000,00	102.000,00	48.000,00																																																																																																																																																																					
No	Kelas	Visite/Konsul																																																																																																																																																																							
		Dokter Ahli	JASA																																																																																																																																																																						
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																					
1	ICU/NICU	118.000,00	80.240,00	37.760,00																																																																																																																																																																					
2	VIP	88.500,00	60.180,00	28.320,00																																																																																																																																																																					
3	Kelas I	47.200,00	32.096,00	15.104,00																																																																																																																																																																					
4	Kelas II	29.500,00	20.060,00	9.440,00																																																																																																																																																																					
5	Kelas III	23.600,00	16.048,00	7.552,00																																																																																																																																																																					
6	Isolasi	118.000,00	80.240,00	37.760,00																																																																																																																																																																					
No	Kelas	Tarif/ Akomodasi	JASA																																																																																																																																																																						
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																					
1	ICU/NICU	550.000,00																																																																																																																																																																							
2	VIP	400.000,00																																																																																																																																																																							
3	Kelas I	213.000,00																																																																																																																																																																							
4	Kelas II	150.000,00																																																																																																																																																																							
5	Kelas III	119.000,00																																																																																																																																																																							
6	Observasi IGD/VK/Anak	210.000																																																																																																																																																																							
7	Ruang Perawatan Isolasi	210.000																																																																																																																																																																							
8	Recovery Room	210.000																																																																																																																																																																							
No	Kelas	Visite/Konsul																																																																																																																																																																							
		Dokter Ahli	JASA Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																					
1	ICU/NICU	118.000,00	80.240,00	37.760,00																																																																																																																																																																					
2	VIP	xxx	60.180	xxx																																																																																																																																																																					
3	Kelas I	xxx	32.096	xxx																																																																																																																																																																					
4	Kelas II	xxx	20.060	xxx																																																																																																																																																																					
5	Kelas III	xxx	16.048	xxx																																																																																																																																																																					
6	Isolasi	xxx	80.240	xxx																																																																																																																																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																
		<p>b. Biaya Pemeriksaan, Konsultasi dan Tindakan Medis</p> <p>1. Dokter Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelas</th> <th colspan="3">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th colspan="3">JASA</th> </tr> <tr> <th>Dokter Umum</th> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>59.000,00</td> <td>40.120,00</td> <td>18.880,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>53.100,00</td> <td>36.108,00</td> <td>16.992,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>29.500,00</td> <td>20.060,00</td> <td>9.440,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>23.600,00</td> <td>16.048,00</td> <td>7.552,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>17.700,00</td> <td>12.036,00</td> <td>5.664,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td>59.000,00</td> <td>40.120,00</td> <td>18.880,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dokter Ahli</p> <p>3. Psikiatri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelas</th> <th rowspan="3">Psikiatri</th> <th colspan="2">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>120.000,00</td> <td>81.600,00</td> <td>38.400,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>110.000,00</td> <td>74.800,00</td> <td>35.200,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>100.000,00</td> <td>68.000,00</td> <td>32.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>90.000,00</td> <td>61.200,00</td> <td>28.800,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Visite/Konsul			JASA			Dokter Umum	Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	59.000,00	40.120,00	18.880,00	2	VIP	53.100,00	36.108,00	16.992,00	3	Kelas I	29.500,00	20.060,00	9.440,00	4	Kelas II	23.600,00	16.048,00	7.552,00	5	Kelas III	17.700,00	12.036,00	5.664,00	6	Isolasi	59.000,00	40.120,00	18.880,00	No	Kelas	Psikiatri	Visite/Konsul		JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU				2	VIP	120.000,00	81.600,00	38.400,00	3	Kelas I	110.000,00	74.800,00	35.200,00	4	Kelas II	100.000,00	68.000,00	32.000,00	5	Kelas III	90.000,00	61.200,00	28.800,00	6	Isolasi				<p>tarif jasa visite/konsul diseragamkan antar kelas perawatan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelas</th> <th colspan="3">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th colspan="3">JASA</th> </tr> <tr> <th>Dokter Umum</th> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>59.000,00</td> <td>40.120,00</td> <td>18.880,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>xxx</td> <td>36.108,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>xxx</td> <td>20.060,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>xxx</td> <td>16.048,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>xxx</td> <td>12.036,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td>xxx</td> <td>40.120,00</td> <td>xxx</td> </tr> </tbody> </table> <p>tarif jasa visite/konsul diseragamkan antarkelas perawatan.</p> <p>Diperbaiki tabel tarifnya dengan tarif jasa visite/konsul diseragamkan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelas</th> <th rowspan="3">Psikiatri</th> <th colspan="2">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>xxx</td> <td>81.600,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>xxx</td> <td>74.800,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>xxx</td> <td>68.000,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>xxx</td> <td>61.200,00</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Visite/Konsul			JASA			Dokter Umum	Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	59.000,00	40.120,00	18.880,00	2	VIP	xxx	36.108,00	xxx	3	Kelas I	xxx	20.060,00	xxx	4	Kelas II	xxx	16.048,00	xxx	5	Kelas III	xxx	12.036,00	xxx	6	Isolasi	xxx	40.120,00	xxx	No	Kelas	Psikiatri	Visite/Konsul		JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU				2	VIP	xxx	81.600,00	xxx	3	Kelas I	xxx	74.800,00	xxx	4	Kelas II	xxx	68.000,00	xxx	5	Kelas III	xxx	61.200,00	xxx	6	Isolasi				<p>Penetapan tarif untuk pelayanan visite/konsul dokter seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan.</p> <p>Kelas ICU/NICU dapat dipertimbangkan berbeda memperhitungkan adanya upaya lebih dan kriteria tersendiri dalam standar pelayanan perawatan intensif.</p> <p>Sda.</p> <p>Penetapan tarif untuk pelayanan visite/konsul dokter seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan.</p>
No	Kelas	Visite/Konsul																																																																																																																																																																		
		JASA																																																																																																																																																																		
		Dokter Umum	Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																
1	ICU/NICU	59.000,00	40.120,00	18.880,00																																																																																																																																																																
2	VIP	53.100,00	36.108,00	16.992,00																																																																																																																																																																
3	Kelas I	29.500,00	20.060,00	9.440,00																																																																																																																																																																
4	Kelas II	23.600,00	16.048,00	7.552,00																																																																																																																																																																
5	Kelas III	17.700,00	12.036,00	5.664,00																																																																																																																																																																
6	Isolasi	59.000,00	40.120,00	18.880,00																																																																																																																																																																
No	Kelas	Psikiatri	Visite/Konsul																																																																																																																																																																	
			JASA																																																																																																																																																																	
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																
1	ICU/NICU																																																																																																																																																																			
2	VIP	120.000,00	81.600,00	38.400,00																																																																																																																																																																
3	Kelas I	110.000,00	74.800,00	35.200,00																																																																																																																																																																
4	Kelas II	100.000,00	68.000,00	32.000,00																																																																																																																																																																
5	Kelas III	90.000,00	61.200,00	28.800,00																																																																																																																																																																
6	Isolasi																																																																																																																																																																			
No	Kelas	Visite/Konsul																																																																																																																																																																		
		JASA																																																																																																																																																																		
		Dokter Umum	Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																
1	ICU/NICU	59.000,00	40.120,00	18.880,00																																																																																																																																																																
2	VIP	xxx	36.108,00	xxx																																																																																																																																																																
3	Kelas I	xxx	20.060,00	xxx																																																																																																																																																																
4	Kelas II	xxx	16.048,00	xxx																																																																																																																																																																
5	Kelas III	xxx	12.036,00	xxx																																																																																																																																																																
6	Isolasi	xxx	40.120,00	xxx																																																																																																																																																																
No	Kelas	Psikiatri	Visite/Konsul																																																																																																																																																																	
			JASA																																																																																																																																																																	
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																																																																																
1	ICU/NICU																																																																																																																																																																			
2	VIP	xxx	81.600,00	xxx																																																																																																																																																																
3	Kelas I	xxx	74.800,00	xxx																																																																																																																																																																
4	Kelas II	xxx	68.000,00	xxx																																																																																																																																																																
5	Kelas III	xxx	61.200,00	xxx																																																																																																																																																																
6	Isolasi																																																																																																																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<p>4. Gizi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelas</th> <th colspan="3">Visite/Konsul</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Gizi</th> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ICU/NICU</td> <td>18.000,00</td> <td>12.240,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIP</td> <td>18.000,00</td> <td>12.240,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>18.000,00</td> <td>12.240,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelas II</td> <td>18.000,00</td> <td>12.240,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelas III</td> <td>18.000,00</td> <td>12.240,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Isolasi</td> <td>18.000,00</td> <td>12.240,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Visite/Konsul			Gizi	JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	ICU/NICU	18.000,00	12.240,00	5.760,00	2	VIP	18.000,00	12.240,00	5.760,00	3	Kelas I	18.000,00	12.240,00	5.760,00	4	Kelas II	18.000,00	12.240,00	5.760,00	5	Kelas III	18.000,00	12.240,00	5.760,00	6	Isolasi	18.000,00	12.240,00	5.760,00	-	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.
No	Kelas	Visite/Konsul																																										
		Gizi			JASA																																							
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																								
1	ICU/NICU	18.000,00	12.240,00	5.760,00																																								
2	VIP	18.000,00	12.240,00	5.760,00																																								
3	Kelas I	18.000,00	12.240,00	5.760,00																																								
4	Kelas II	18.000,00	12.240,00	5.760,00																																								
5	Kelas III	18.000,00	12.240,00	5.760,00																																								
6	Isolasi	18.000,00	12.240,00	5.760,00																																								
		<p>4. Laboratorium dan Radiologi</p> <p>a. Laboratorium dan Patologi klinik (Berlaku untuk semua kelas perawatan) < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>b. Laboratorium Patologi Anatomi < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>c. Laboratorium Mikrobiologi Klinik < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>d. UTDRS < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>e. Radiologi < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>klasifikasi Pelayanan cito di luar jam dinas dikenakan 23% dari retribusi tambahan dari jasa pelayanan yang ditetapkan 000 (Untuk penetapan diagnose/analisa akhir dokter spesialis radiologi ditambahkan jasa pelayanan 20. sedang) dan 150.000 (klasifikasi ringan), 75.000 ((klasifikasi canggih)</p>	<p>Tabel tarif ditambahkan kolom satuan.</p> <p>Tindakan CITO hendaknya dibuatkan tabel tarif tersendiri dengan menyertakan nilai besaran tarif retribusi, dan agar ditetapkan dalam angka rupiah dan satuan layanan harus ditetapkan secara definitif dalam struktur tarif Perda PDRD sebagaimana ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU HKPD</p>	<p>- Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. Pemda seyogianya mempertimbangkan untuk menyajikan informasi terkait tarif dalam bagian keterangan dalam bentuk tabel tarif sehingga informasi mengenai tarif lebih jelas dan transparan.</p> <p>- Mengacu pada Pasal 92 UU Nomor 1 Tahun 2022, tarif Retribusi ditetapkan dalam nominal rupiah definitif sehingga tarif berupa persentase harus dikonversi/disajikan dalam nominal rupiah.</p>																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan										
		<p>5. Tindakan Invasif dan Non Invasif < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>6. Tindakan Keperawatan < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>7. Operasi < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>Operasi Emergency (cito) luar jam dinas ditambahkan 30% dari Jasa Tarif operasi</p> <p>8. Persalinan < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>9. Farmasi < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>1. Harga Obat < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>2. Harga BMHP < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>10. Pemulasaran Jenasah < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>11. Medikal Legal < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>12. Ambulance dan Mobil Jenasah</p> <p>a. Ambulance < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>b. Mobil Jenasah < tabel tarif tanpa kolom satuan ></p> <p>13. Laundry</p>	<p>Semua Tabel tarif ditambahkan kolom satuan.</p> <p>Tindakan CITO hendaknya dibuatkan tabel tarif tersendiri dengan menyertakan nilai besaran tarif retribusi, dan agar ditetapkan dalam angka rupiah dan satuan layanan harus ditetapkan secara definitif dalam struktur tarif Perda PDRD sebagaimana ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU HKPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. - Pemda seyogianya mempertimbangkan untuk menyajikan informasi terkait tarif dalam bagian keterangan dalam bentuk tabel tarif sehingga informasi mengenai tarif lebih jelas dan transparan. - Mengacu pada Pasal 92 UU Nomor 1 Tahun 2022, tarif Retribusi ditetapkan dalam nominal rupiah definitif sehingga tarif berupa persentase harus dikonversi/disajikan dalam nominal rupiah. 										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Tarif</th> <th colspan="2" style="width: 55%;">JASA</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Saran (Rp)</th> <th style="width: 40%;">Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perlembar</td> <td style="text-align: right;">6.000,00</td> <td style="text-align: right;">4.080,00</td> <td style="text-align: right;">1.920,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Tarif	JASA		Saran (Rp)	Pelayanan (Rp)	Perlembar	6.000,00	4.080,00	1.920,00		
Jenis Pelayanan	Tarif	JASA												
		Saran (Rp)	Pelayanan (Rp)											
Perlembar	6.000,00	4.080,00	1.920,00											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		14. Tarif Pendidikan dan Pelatihan					
		No	Jenis Kegiatan	Praktikan	Tarif	JASA	
			Pratik			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)
				1. SMA/Sederajat	3.500,00	2.380,00	1.120,00
				2. DI - D4	9.000,00	6.120,00	2.880,00
				3. DIV - S1	12.000,00	8.160,00	3.840,00
						Dihapus.	
						Praktik kerja, magang, studi banding, pelatihan, penelitian, seminar, workshop, nara sumber, dan hal-hal sejenis lainnya bukan merupakan pelayanan kesehatan sebagaimana di atur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 sehingga tidak termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
1	a.Orang/ hari	4. Profesi	22.000,00	14.960,00	7.040,00		- Pemda masih dapat menerima pendapatan yang bersumber dari kegiatan tersebut dan mencatatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bukan sebagai pendapatan Retribusi).
		5. S2/PPDS	29.000,00	19.720,00	9.280,00		
		6. Karyawan/ Umum	36.000,00	24.480,00	11.520,00		
		7. Mahasiswa Asing	75.000,00	51.000,00	24.000,00		
	b.Orang/ Minggu	1. SMA/Sederajat	15.000,00	10.200,00	4.800,00		
		2. DI-D4	43.000,00	29.240,00	13.760,00		
		3. DIV-S1	58.000,00	39.440,00	18.560,00		
		4. Profesi	116.000,00	78.880,00	37.120,00		
		5. S2/PPDS	130.000,00	88.400,00	41.600,00		
		6. Karyawan/Umum	160.000,00	108.800,00	51.200,00		
		7. Mahasiswa Asing	288.000,00	195.840,00	92.160,00		
	e.Orang/ Bulan	1. SMA/Sederajat	35.000,00	23.800,00	11.200,00		
		2. DI-D4	129.000,00	87.720,00	41.280,00		
		3. DIV-S1	158.000,00	107.440,00	50.560,00		
		4. Profesi	390.000,00	265.200,00	124.800,00		
		5. S2/PPDS	447.000,00	303.960,00	143.040,00		
		6. Karyawan/Umum	575.000,00	391.000,00	184.000,00		
		7. Mahasiswa Asing	1.037.000,00	705.160,00	331.840,00		
	2	Magang/ Peningkatan Ketrampilan					
	a.Orang/ Bulan	1. SMA/Sederajat	35.000,00	23.800,00	11.200,00		
		2. DI-D4	128.000,00	87.040,00	40.960,00		
		3. DIV-S1	158.000,00	107.440,00	50.560,00		
		4. Profesi	388.000,00	263.840,00	124.160,00		
		5. S2/PPDS	445.000,00	302.600,00	142.400,00		
		6. Karyawan/Umum	575.000,00	391.000,00	184.000,00		
		7. Mahasiswa Asing	1.036.000,00	704.480,00	331.520,00		
		1. SMA/Sederajat	21.000,00	14.280,00	6.720,00		
		2. DI-D4	35.000,00	23.800,00	11.200,00		
3. DIV-S1		57.000,00	38.760,00	18.240,00			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan		
		3	Pra Penelitian	4. Profesi	85.000,00	57.800,00	27.200,00		
				5. S2/PPDS	172.000,00	116.960,00	55.040,00		
				6. Karyawan/Umum	172.000,00	116.960,00	55.040,00		
				7. Mahasiswa Asing	431.000,00	293.080,00	137.920,00		
		4	Pra Kegiatan	Penelitian	1. SMA/Sederajat	71.000,00	48.280,00		22.720,00
					2. DI-D4	85.000,00	57.800,00		27.200,00
					3. DIV-S1	128.000,00	87.040,00		40.960,00
					4. Profesi	345.000,00	234.600,00		110.400,00
					5. S2/PPDS	345.000,00	234.600,00		110.400,00
					6. Karyawan/Umum	345.000,00	234.600,00		110.400,00
					7. Mahasiswa Asing	1.036.000,00	704.480,00		331.520,00
		5	a. Orang/hari	Studi Banding	1. Siswa (TK-SMU)	16.000,00	10.880,00		5.120,00
					2. Mahasiswa	50.000,00	34.000,00		16.000,00
					3. Karyawan/Umum	50.000,00	34.000,00		16.000,00
					4. Mahasiswa Asing	768.000,00	522.240,00		245.760,00
15. Tarif Parkir						Direposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Direposisi ke Jasa Usaha Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan. - Informasi mengenai proporsi bagi hasil tidak perlu dicantumkan dalam Perda, tapi cukup diatur dalam perjanjian dengan pihak terkait. - Pemda melakukan kerja sama pemungutan dengan mengacu pada Pasal 66 PP Nomor 35 Tahun 2023. 		
No	Jenis Pelayanan	Tarif							
1	Parkir Motor	2.000,00							
2	Parkir Mobil/truk	5.000,00							
Cat. Kerjasama dengan Pihak Ke 3 dengan perjanjian pembagian pendapatan 70%: 30%									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
		<p>16. Tarif Sterilisasi Alat Medis <i>< tabel tarif tanpa kolom satuan ></i></p> <p>17. Tarif Pengisian Oksigen <i>< tabel tarif tanpa kolom satuan beserta keterangan ></i></p>	<p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila layanan sterilisasi alat medis dan pengisian oksigen disediakan untuk pihak ketiga dalam rangkajuan komersial, layanan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai layanan yang menjadi objek dari Retribusi Jasa Umum. - Pemda masih dapat menerima pendapatan yang bersumber dari kegiatan tersebut dan mencatatnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan (bukansebagai pendapatan Retribusi). 																																												
		<p>18. Tarif Sewa Lahan/Gedung</p> <table border="1" data-bbox="318 787 1153 1190"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="2">Tarif</th> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sewa lahan / tahun</td> <td>6.000.000,00</td> <td>4.080.000,00</td> <td>1.920.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sewa Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar</td> <td>500.000,00</td> <td>340.000,00</td> <td>160.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi/ jenazah</td> <td>300.000,00</td> <td>204.000,00</td> <td>96.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif	JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	Sewa lahan / tahun	6.000.000,00	4.080.000,00	1.920.000,00	2	Sewa Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar	500.000,00	340.000,00	160.000,00	3	Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi/ jenazah	300.000,00	204.000,00	96.000,00	<table border="1" data-bbox="1211 768 2023 1135"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="2">Tarif</th> <th colspan="2">JAS A</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>direposisi</td> <td>direposisi</td> <td>direposisi</td> <td>direposisi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar</td> <td>500.000,00</td> <td>340.000,00</td> <td>160.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi/jenazah</td> <td>300.000,00</td> <td>204.000,00</td> <td>96.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif	JAS A		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	1	direposisi	direposisi	direposisi	direposisi	2	Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar	500.000,00	340.000,00	160.000,00	3	Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi/jenazah	300.000,00	204.000,00	96.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa lahan direposisi ke Pemanfaatan Aset Daerah. - Dalam hal ruang operasi/kamar jenazah disewakan kepada pihak ketiga (bukan disediakan untuk pasien RS yang bersangkutan), layanan tersebut direposisi ke pemanfaatan aset daerah.
No	Jenis Pelayanan	Tarif				JASA																																										
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																												
1	Sewa lahan / tahun	6.000.000,00	4.080.000,00	1.920.000,00																																												
2	Sewa Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar	500.000,00	340.000,00	160.000,00																																												
3	Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi/ jenazah	300.000,00	204.000,00	96.000,00																																												
No	Jenis Pelayanan	Tarif	JAS A																																													
			Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																												
1	direposisi	direposisi	direposisi	direposisi																																												
2	Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar	500.000,00	340.000,00	160.000,00																																												
3	Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi/jenazah	300.000,00	204.000,00	96.000,00																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																														
		18. Tarif Incenerator <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="2">Tarif</th> <th colspan="2">JASA</th> </tr> <tr> <th>Sarana (Rp)</th> <th>Pelayanan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemusnahan sampah medis/Kg</td> <td>17.500,00</td> <td>11.900,00</td> <td>5.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Tarif	JASA		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	Pemusnahan sampah medis/Kg	17.500,00	11.900,00	5.600,00	Ditambahkan kolom satuan	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.																																																																																																				
Jenis Pelayanan	Tarif	JASA																																																																																																																
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)																																																																																																															
Pemusnahan sampah medis/Kg	17.500,00	11.900,00	5.600,00																																																																																																															
		2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th rowspan="2">JASA SARANA</th> <th colspan="2">JASA LAYANAN</th> <th rowspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th>NON MEDIS</th> <th>MEDIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RAWAT JALAN</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>7.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>140.000,00</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RAWAT KUNJUNGAN RUMAH</td> <td>7.500,00</td> <td>7.500,00</td> <td>35.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="5">TINDAKAN MEDIK PERAWATAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">a. Tindakan medik ringan</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">b. Tindakan medik sedang</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">c. Tindakan medik gigi</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">d. Pemeriksaan Laboratorium</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">e. Pelayanan lain lain</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="5">PELAYANAN KESEHATAN DASAR KEBIDANAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">a. Pemeriksaan ANC</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">b. Persalinan Pervaginam Normal</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">c. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">d. Pelayanan prarujukan komplikasi kehamilan</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">e. Pelayanan pervaginam dengan Puskesmas PONED</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">f. Pelayanan KB</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">g. Pemeriksaan PNC/Neonatus</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN		TARIF	NON MEDIS	MEDIS	1	RAWAT JALAN	1.500,00	1.500,00	7.000,00	10.000,00	2	RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA	30.000,00	30.000,00	140.000,00	200.000,00	3	RAWAT KUNJUNGAN RUMAH	7.500,00	7.500,00	35.000,00	50.000,00	4	TINDAKAN MEDIK PERAWATAN						a. Tindakan medik ringan						b. Tindakan medik sedang						c. Tindakan medik gigi						d. Pemeriksaan Laboratorium						e. Pelayanan lain lain					5	PELAYANAN KESEHATAN DASAR KEBIDANAN						a. Pemeriksaan ANC						b. Persalinan Pervaginam Normal						c. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan						d. Pelayanan prarujukan komplikasi kehamilan						e. Pelayanan pervaginam dengan Puskesmas PONED						f. Pelayanan KB						g. Pemeriksaan PNC/Neonatus					Ditambahkan kolom satuan	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA				JASA LAYANAN			TARIF																																																																																																									
			NON MEDIS	MEDIS																																																																																																														
1	RAWAT JALAN	1.500,00	1.500,00	7.000,00	10.000,00																																																																																																													
2	RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA	30.000,00	30.000,00	140.000,00	200.000,00																																																																																																													
3	RAWAT KUNJUNGAN RUMAH	7.500,00	7.500,00	35.000,00	50.000,00																																																																																																													
4	TINDAKAN MEDIK PERAWATAN																																																																																																																	
	a. Tindakan medik ringan																																																																																																																	
	b. Tindakan medik sedang																																																																																																																	
	c. Tindakan medik gigi																																																																																																																	
	d. Pemeriksaan Laboratorium																																																																																																																	
	e. Pelayanan lain lain																																																																																																																	
5	PELAYANAN KESEHATAN DASAR KEBIDANAN																																																																																																																	
	a. Pemeriksaan ANC																																																																																																																	
	b. Persalinan Pervaginam Normal																																																																																																																	
	c. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan																																																																																																																	
	d. Pelayanan prarujukan komplikasi kehamilan																																																																																																																	
	e. Pelayanan pervaginam dengan Puskesmas PONED																																																																																																																	
	f. Pelayanan KB																																																																																																																	
	g. Pemeriksaan PNC/Neonatus																																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		h. Pelayanan tindakan pasca persalinan Puskesmas 6 PELAYANAN SKRINING KESEHATAN TERTENTU 7 TERAPI KRIO UNTUK KASUS PEM 8 PELAYANAN KEFARMASIAN 9 PELAYANAN AMBULANCE																																																														
Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan	B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="361 586 418 657">N O</th> <th data-bbox="418 586 857 657">JENIS PENGGUNA PELAYANAN KEBERSIHAN</th> <th data-bbox="857 586 1044 657">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th data-bbox="1044 586 1236 657">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="361 657 418 696">I</td> <td data-bbox="418 657 857 696">NON NIAGA</td> <td data-bbox="857 657 1044 696"></td> <td data-bbox="1044 657 1236 696"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 696 418 805"></td> <td data-bbox="418 696 857 805">1. Rumah Tempat Tinggal</td> <td data-bbox="857 696 1044 805">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 696 1236 805">10.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 805 418 844">II</td> <td data-bbox="418 805 857 844">NIAGA</td> <td data-bbox="857 805 1044 844"></td> <td data-bbox="1044 805 1236 844"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 844 418 883"></td> <td data-bbox="418 844 857 883">1. Niaga Kecil</td> <td data-bbox="857 844 1044 883"></td> <td data-bbox="1044 844 1236 883"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 883 418 922"></td> <td data-bbox="418 883 857 922">a. Koperasi</td> <td data-bbox="857 883 1044 922">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 883 1236 922">25.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 922 418 1021"></td> <td data-bbox="418 922 857 1021">b. Usaha Perseorangan(kios, warung, PKL, UD dan sejenisnya</td> <td data-bbox="857 922 1044 1021"></td> <td data-bbox="1044 922 1236 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1021 418 1060"></td> <td data-bbox="418 1021 857 1060">1) Klasifikasi A</td> <td data-bbox="857 1021 1044 1060">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1021 1236 1060">10.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1060 418 1099"></td> <td data-bbox="418 1060 857 1099">2) klasifikasi B</td> <td data-bbox="857 1060 1044 1099">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1060 1236 1099">25.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1099 418 1138"></td> <td data-bbox="418 1099 857 1138">3) klasifikasi C</td> <td data-bbox="857 1099 1044 1138">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1099 1236 1138">50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1138 418 1177"></td> <td data-bbox="418 1138 857 1177">4) klasifikasi D</td> <td data-bbox="857 1138 1044 1177">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1138 1236 1177">100.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1177 418 1216"></td> <td data-bbox="418 1177 857 1216">c. Praktek Dokter</td> <td data-bbox="857 1177 1044 1216">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1177 1236 1216">50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1216 418 1255"></td> <td data-bbox="418 1216 857 1255">d. Apotik</td> <td data-bbox="857 1216 1044 1255">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1216 1236 1255">50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1255 418 1294"></td> <td data-bbox="418 1255 857 1294">e. Klinik</td> <td data-bbox="857 1255 1044 1294">Per-bulan</td> <td data-bbox="1044 1255 1236 1294">10.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="361 1294 418 1333"></td> <td data-bbox="418 1294 857 1333">2. Niaga Besar</td> <td data-bbox="857 1294 1044 1333"></td> <td data-bbox="1044 1294 1236 1333"></td> </tr> </tbody> </table>	N O	JENIS PENGGUNA PELAYANAN KEBERSIHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	I	NON NIAGA				1. Rumah Tempat Tinggal	Per-bulan	10.000,00	II	NIAGA				1. Niaga Kecil				a. Koperasi	Per-bulan	25.000,00		b. Usaha Perseorangan(kios, warung, PKL, UD dan sejenisnya				1) Klasifikasi A	Per-bulan	10.000,00		2) klasifikasi B	Per-bulan	25.000,00		3) klasifikasi C	Per-bulan	50.000,00		4) klasifikasi D	Per-bulan	100.000,00		c. Praktek Dokter	Per-bulan	50.000,00		d. Apotik	Per-bulan	50.000,00		e. Klinik	Per-bulan	10.000,00		2. Niaga Besar			Pemda perlu memutuskan struktur dan besaran tarif mana yang akan diatur dan ditetapkan dalam Perda.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. - Teks/tabel yang diwarnai biru muncul pada matriks evaluasi namun tidak ada dalam lampiran Raperda. - Mengingat terdapat perbedaan antara struktur dan besaran tarif antara muatan dalam matriks dan lampiran Raperda, Pemda perlu memutuskan layanan dan tarif mana yang akan ditetapkan dalam Perda.
N O	JENIS PENGGUNA PELAYANAN KEBERSIHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																													
I	NON NIAGA																																																															
	1. Rumah Tempat Tinggal	Per-bulan	10.000,00																																																													
II	NIAGA																																																															
	1. Niaga Kecil																																																															
	a. Koperasi	Per-bulan	25.000,00																																																													
	b. Usaha Perseorangan(kios, warung, PKL, UD dan sejenisnya																																																															
	1) Klasifikasi A	Per-bulan	10.000,00																																																													
	2) klasifikasi B	Per-bulan	25.000,00																																																													
	3) klasifikasi C	Per-bulan	50.000,00																																																													
	4) klasifikasi D	Per-bulan	100.000,00																																																													
	c. Praktek Dokter	Per-bulan	50.000,00																																																													
	d. Apotik	Per-bulan	50.000,00																																																													
	e. Klinik	Per-bulan	10.000,00																																																													
	2. Niaga Besar																																																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. Bank	Per-bulan	100.000,00
		b. BUMN/BUMD	Per-bulan	100.000,00
		c. Toko Besar di Jalan Utama Protokol	Per-bulan	100.000,00
		d. Rumah Makan Besar	Per-bulan	100.000,00
		e. Hotel	Per-bulan	100.000,00
		f. Rumah Sakit Swasta	Per-bulan	100.000,00
		III INDUSTRI		
		1. Industri Besar		
		a. Bengkel Mobil	Per-bulan	100.000,00
		b. Dealer Motor	Per-bulan	100.000,00
		c. Pabrik Es dan sejenisnya	Per-bulan	100.000,00
		2. Industri Kecil		
		a. Tahu Tempe	Per-bulan	100.000,00
		b. Pengrajin Rumah Tangga	Per-bulan	50.000,00
		c. Bengel Motor	Per-bulan	50.000,00
		d. Bengkel Las	Per-bulan	50.000,00
		e. Penggilingan Padi	Per-bulan	100.000,00
		f. Tambal Ban	Per-bulan	50.000,00
		IV PEMERINTAH		
		1. Instansi Pemerrintah	Per-bulan	100.000,00
		2. Sekolah	Per-bulan	100.000,00
		3. Rumas Sakit Pemerintah	Per-bulan	100.000,00
		4. Puskesmas	Per-bulan	100.000,00
		V PELAKSANA KEGIATAN/EO		
		1. Panitia Pelaksana Kegiatan		
		a. Kegiatan Besar	Per-bulan	500.000,00
		b. Kegiatan Kecil	Per-bulan	250.000,00

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		2. Pesta/Kedukaan					
		a. Pesta	Per-bulan	250.000,00			
		b. Kedukaan	Per-bulan	50.000,00			
		<p>B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN</p> <p>1. PELAYANAN PERSAMPAHAN</p> <p>a. Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga < tabel tarif ></p> <p>b. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Hotel < tabel tarif ></p> <p>c. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Penyediaan Makan dan/atau Minum < tabel tarif ></p> <p>keterangan:</p> <p>1. Kategori Rumah Tangga</p> <p>a. Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.</p> <p>b. Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.</p> <p>c. Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.</p> <p>d. Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.</p> <p>2. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta</p> <p>a. Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.</p>				<p>- Agar Pemda menetapkan tarif yang akan dipungut mengingat terdapat perbedaan antara Draft Raperda dan Matriks Raperda yang disampaikan</p>	<p>- Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																					
		<p>b. Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.</p> <p>c. Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.</p> <p>3. Kategori Persampahan Umum</p> <p>a. Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.</p> <p>b. Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.</p> <p>c. Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.</p>																							
	Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 1060 458 1101">NO</th> <th data-bbox="458 1060 899 1101">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th data-bbox="899 1060 1084 1174">SATUAN PEMAKAIA N</th> <th data-bbox="1084 1060 1265 1101">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1174 458 1404" rowspan="3">1</td> <td data-bbox="458 1174 899 1206">Parkir kendaraan bermotor:</td> <td data-bbox="899 1174 1084 1206"></td> <td data-bbox="1084 1174 1265 1206"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="458 1206 899 1287">a. kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3</td> <td data-bbox="899 1206 1084 1287">Sekali parkir</td> <td data-bbox="1084 1206 1265 1287">2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="458 1287 899 1328">b. Roda 4</td> <td data-bbox="899 1287 1084 1328">Sekali parkir</td> <td data-bbox="1084 1287 1265 1328">5.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1328 458 1404" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="458 1328 899 1369">Parkir kendaraan bermotor berlangganan:</td> <td data-bbox="899 1328 1084 1369"></td> <td data-bbox="1084 1328 1265 1369"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="458 1369 899 1404">a. Roda 4 ke atas</td> <td data-bbox="899 1369 1084 1404">Per-6 (enam)</td> <td data-bbox="1084 1369 1265 1404">180.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIA N	TARIF (Rp)	1	Parkir kendaraan bermotor:			a. kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00	2	Parkir kendaraan bermotor berlangganan:			a. Roda 4 ke atas	Per-6 (enam)	180.000,00	C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM -	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. Perbaiki legal drafting.
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIA N	TARIF (Rp)																						
1	Parkir kendaraan bermotor:																								
	a. kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00																						
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00																						
2	Parkir kendaraan bermotor berlangganan:																								
	a. Roda 4 ke atas	Per-6 (enam)	180.000,00																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			bulan			
	Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar	D. TARIF PELAYANAN PASAR				Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.
		N O	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
		1	PASAR KELAS I			
			a. Kios	m2/bulan	30.000,00	
			b. Los			
			1. Los dengan/tanpa meja	m2/hari	1.000,00	
			2. Los dengan bale-bale semi permanen swadaya pedagang	m2/hari	2.000,00	
			c. Pelataran:			
			1. Pelataran terbuka	m2/hari	2.000,00	
			2. Pelataran dengan bale-bale semi permanen swadaya pedagang	m2/hari	0	
			3. Pelataran dengan dagangan yang menggunakan kereta	m2/hari	3.000,00	
			d. Fasilitas lain di dalam PasarWC/KM umum	Sekali pakai	2.000,00	
		2	PASAR KELAS II			
			a. Kios	m2/bulan	15.000,00	
			b. Los			
			1) Los dengan/tanpa meja	m2/hari	1.000,00	
			2) Los dengan bale-bale semi permanen swadaya pedagang	m2/hari	1.000,00	
			c. Pelataran:			
			1) Pelataran terbuka	m2/hari	1.000,00	
			2) Pelataran dengan bale-bale semi permanen swadaya pedagang	m2/hari	1.000,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		3) Pelataran dengan dagangan yang menggunakan kereta m2/hari 3.000,00		
		d. Fasilitas Lain di dalam Pasar WC/KM umum Sekali pakai 1.500,00		
B. Retribusi Jasa Usaha				
1.	Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi	<p>Pasal 87</p> <p>Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>Pasal 90</p> <p>Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (7) dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023.
2.	Objek Retribusi	<p>Pasal 101</p> <p>(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 		Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (1) s.d. Ayat (6) PP Nomor 35 Tahun 2023.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
3.	Rincian Pelayanan			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pemanfaatan aset Daerah	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
5.	Tarif Retribusi	<p>Pasal 117</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Telah sesuai</p> <p>(2) Telah sesuai</p> <p>(2a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(3) <i>Telah sesuai</i></p> <p>(3a) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3b) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3c) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(3d) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(3e) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (8), (9), (10), (11), dan Ayat (12) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>- dengan adanya penambahan atau pengurangan ayat maka tata urutan penomoran ayat agar disesuaikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat kegiatan usaha	<p>LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp) RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangunan Rumah Toko di Jalan A. Yani a. Lantai pertama luas 24m2 b. Lantai II luas 24 m2</td> <td>Per-bulanPer-bulan</td> <td>1.224.000,00 720.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Rumah Toko di Eweta</td> <td>Per-bulan</td> <td>864.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Bangunan Rumah Toko di Jalan A. Yani a. Lantai pertama luas 24m2 b. Lantai II luas 24 m2	Per-bulanPer-bulan	1.224.000,00 720.000,00	2	Bangunan Rumah Toko di Eweta	Per-bulan	864.000,00	- A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. Perbaiki <i>legal drafting</i> .												
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																									
1	Bangunan Rumah Toko di Jalan A. Yani a. Lantai pertama luas 24m2 b. Lantai II luas 24 m2	Per-bulanPer-bulan	1.224.000,00 720.000,00																									
2	Bangunan Rumah Toko di Eweta	Per-bulan	864.000,00																									
	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan	<p>j. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>a. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3</td> <td>Sekali parkir</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Kendaraan Roda 4</td> <td>Sekali parkir</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>c. Kendaraan Roda 6 ke atas</td> <td>Sekali parkir</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>Parkir kendaraan bermotor berlangganan:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Roda 4</td> <td>Per-6 (enam) bulan</td> <td>180.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Roda 6 ke atas</td> <td>Per-6 (enam) bulan</td> <td>270.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	a. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	Sekali parkir	2.000,00	b. Kendaraan Roda 4	Sekali parkir	5.000,00	c. Kendaraan Roda 6 ke atas	Sekali parkir	6.000,00	2	Parkir kendaraan bermotor berlangganan:			a. Roda 4	Per-6 (enam) bulan	180.000,00	b. Roda 6 ke atas	Per-6 (enam) bulan	270.000,00	B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. Perbaiki <i>legal drafting</i> .
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																									
1	a. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	Sekali parkir	2.000,00																									
	b. Kendaraan Roda 4	Sekali parkir	5.000,00																									
	c. Kendaraan Roda 6 ke atas	Sekali parkir	6.000,00																									
2	Parkir kendaraan bermotor berlangganan:																											
	a. Roda 4	Per-6 (enam) bulan	180.000,00																									
	b. Roda 6 ke atas	Per-6 (enam) bulan	270.000,00																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila	<p>C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tempat Penginapan di BPP Dokakaka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kamar</td> <td>hari</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Aula</td> <td>hari</td> <td>500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Tempat Penginapan di BPP Dokakaka				a. Kamar	hari	100.000,00		b. Aula	hari	500.000,00	<p>C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILA</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. Perbaiki <i>legal drafting</i> .																																																				
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																					
1	Tempat Penginapan di BPP Dokakaka																																																																							
	a. Kamar	hari	100.000,00																																																																					
	b. Aula	hari	500.000,00																																																																					
	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak	<p>D. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. sapi, kerbau, kuda</td> <td>ekor</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. babi</td> <td>ekor</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. kambing, domba</td> <td>ekor</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. unggas</td> <td>ekor</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. sapi, kerbau, kuda</td> <td>ekor</td> <td>35.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. babi</td> <td>ekor</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. kambing, domba</td> <td>ekor</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. unggas</td> <td>ekor</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong				a. sapi, kerbau, kuda	ekor	15.000,00		b. babi	ekor	10.000,00		c. kambing, domba	ekor	5.000,00		d. unggas	ekor	2.000,00	2	Pemakaian tempat pemotongan				a. sapi, kerbau, kuda	ekor	35.000,00		b. babi	ekor	20.000,00		c. kambing, domba	ekor	15.000,00		d. unggas	ekor	5.000,00	<p>D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemakaian tempat pemotongan (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. sapi, kerbau, kuda</td> <td>ekor</td> <td>xxxxxx,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. babi</td> <td>ekor</td> <td>xxxxxx,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. kambing, domba</td> <td>ekor</td> <td>xxxxxx,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	dihapus			2	Pemakaian tempat pemotongan (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong)				a. sapi, kerbau, kuda	ekor	xxxxxx,00		b. babi	ekor	xxxxxx,00		c. kambing, domba	ekor	xxxxxx,00	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. - Pemda diimbau untuk memperhitungkan layanan pemeriksaan sebelum dan sesudah sebagai variable / komponen pembentuk / penentu tarif pelayanan pemotongan / pemakaian tempat pemotongan hewan ternak.
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																					
1	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong																																																																							
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	15.000,00																																																																					
	b. babi	ekor	10.000,00																																																																					
	c. kambing, domba	ekor	5.000,00																																																																					
	d. unggas	ekor	2.000,00																																																																					
2	Pemakaian tempat pemotongan																																																																							
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	35.000,00																																																																					
	b. babi	ekor	20.000,00																																																																					
	c. kambing, domba	ekor	15.000,00																																																																					
	d. unggas	ekor	5.000,00																																																																					
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																					
1	dihapus																																																																							
2	Pemakaian tempat pemotongan (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong)																																																																							
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	xxxxxx,00																																																																					
	b. babi	ekor	xxxxxx,00																																																																					
	c. kambing, domba	ekor	xxxxxx,00																																																																					
	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	<p>E. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> Produksi Bidang Perikanan < tabel tarif > Produksi Bidang Pertanian < tabel tarif > Produksi Bidang Peternakan < tabel tarif > 	<p>E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH</p>	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023. Perbaiki <i>legal drafting</i> .																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan aset Daerah	<p>F. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">RETRIBUSI</th> </tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemanfaatan tanah</td> <td>m2 per Tahun</td> <td>3.33% x LT x NT*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Keterangan: LT: Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m²).</p>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1.	Pemanfaatan tanah	m2 per Tahun	3.33% x LT x NT*	<p>F. PEMANFAATAN ASET DAERAH</p> <p>a. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH Dst.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">RETRIBUSI</th> </tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemanfaatan tanah dan bangunan</td> <td>m2 per Tahun</td> <td>(3.33% x LT x NT) + (6.64% x LB x HS x NSB)*</td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1.	Pemanfaatan tanah dan bangunan	m2 per Tahun	(3.33% x LT x NT) + (6.64% x LB x HS x NSB)*	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada Pasal 92 UU Nomor 1 Tahun 2022, tarif Retribusi ditetapkan dalam nominal rupiah definitif sehingga tarif berupa persentase harus dikonversi/disajikan dalam nominal rupiah. - Dalam hal aset daerah disewakan dengan mekanisme pemanfaatan BMD, Pemda dapat menentukan tarif dan nilai retribusi tertutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI																						
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																					
1.	Pemanfaatan tanah	m2 per Tahun	3.33% x LT x NT*																					
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI																						
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																					
1.	Pemanfaatan tanah dan bangunan	m2 per Tahun	(3.33% x LT x NT) + (6.64% x LB x HS x NSB)*																					

f

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																													
		<table border="1"> <tr> <td>Numpang Uji</td> <td>50.000,</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Numpang Uji	50.000,	50.00	50.00	50.000		0	0,00	0,00	00		0	,00																																		
Numpang Uji	50.000,	50.00	50.00	50.000																																													
	0	0,00	0,00	00																																													
	0	,00																																															
		4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT TERA DAN/ATAU TERA ULANG																																															
		<p>3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM DAERAH</p> <p>a. Pengujian di Bidang Pekerjaan Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Analisa saringan</td> <td>per sampel</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berat isi dan penyerapan</td> <td>per sampel</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Berat isi</td> <td>per sampel</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dst. s.d. Sewa alat slump test</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Sewa sandcone</td> <td>unit/hari</td> <td>250.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pengujian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RINCIAN RETRIBUSI OBJEK</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Antibiotik Spektrum Luas (Broad Spectrum)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>— Dewasa (2,5 tahun keatas)</td> <td>per ekor</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>— Muda (1-2,5 tahun)</td> <td>per ekor</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>— Anak (0-1 tahun)</td> <td>per ekor</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Antibiotik Spektrum Terbatas</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	1	Analisa saringan	per sampel	300.000,00	2	Berat isi dan penyerapan	per sampel	300.000,00	3	Berat isi	per sampel	300.000,00	4	Dst. s.d. Sewa alat slump test			17	Sewa sandcone	unit/hari	250.000,00	RINCIAN RETRIBUSI OBJEK	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda)			1. Antibiotik Spektrum Luas (Broad Spectrum)			— Dewasa (2,5 tahun keatas)	per ekor	25.000,00	— Muda (1-2,5 tahun)	per ekor	20.000,00	— Anak (0-1 tahun)	per ekor	15.000,00	2. Antibiotik Spektrum Terbatas			<p>Direposisi ke Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</p>	<p>- Pengujian pekerjaan umum, lingkungan hidup, pemeriksaan Kesehatan hewan dapat dipertimbangkan untuk dikelompokkan dalam PHPUD sepanjang pelaksanaan pengujian dengan menggunakan peralatan laboratorium dilakukan oleh ASN Pemda dan pelayanan tersebut diberikan oleh Pemda berdasarkan permintaan bukan berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemda.</p>
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																														
1	Analisa saringan	per sampel	300.000,00																																														
2	Berat isi dan penyerapan	per sampel	300.000,00																																														
3	Berat isi	per sampel	300.000,00																																														
4	Dst. s.d. Sewa alat slump test																																																
17	Sewa sandcone	unit/hari	250.000,00																																														
RINCIAN RETRIBUSI OBJEK	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																															
Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda)																																																	
1. Antibiotik Spektrum Luas (Broad Spectrum)																																																	
— Dewasa (2,5 tahun keatas)	per ekor	25.000,00																																															
— Muda (1-2,5 tahun)	per ekor	20.000,00																																															
— Anak (0-1 tahun)	per ekor	15.000,00																																															
2. Antibiotik Spektrum Terbatas																																																	

No. Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

(Narrow Spectrum)

— Dewasa (2,5 tahun keatas)	per ekor	20.000,00
— Muda (1-2,5 tahun)	per ekor	15.000,00
— Anak (0-1 tahun)	per ekor	10.000,00
3. Antibiotik Bekerja Jangka Panjang (Long Acting)		
— Dewasa (2,5 tahun keatas)	per ekor	25.000,00
— Muda (1-2,5 tahun)	per ekor	20.000,00
— Anak (0-1 tahun)	per ekor	15.000,00
Dst s.d. 14. Preparat Peneceilin		

II

V

~~Temak Sedang/Kecil (Babi, Kambing, Domba) 1. Antibiotik Spektrum Luas (Broad Spectrum) dst s.d. 12. Preparat Penicillin~~

~~Temak Unggas~~

III

VI.

~~1. Antibiotik Spektrum Luas (Broad Spectrum) dst s.d. 6. Vaksin Temak Lainnya/Hewan Peliharaan (Anjing, Kucing, Kera)~~

~~1. Antibiotik Spektrum Luas (Broad Spectrum) dst s.d. 10. Ektoparasit Laboratorium~~

IV

~~1. Pemeriksaan Hewan/ Temak Besar dst s.d. 11. Untuk Nekropsi Unggas~~

~~Tempat Penampungan Ternak~~

~~1. Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan~~

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
		<p>Kada)</p> <p>2. Ternak Sedang (Babi, Kambing dan Domba)</p> <p>per ekor 10.000,00</p> <p>Pemanfaatan Aset Lab. Lingkungan Hidup</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MPN Coliform (Total Coliform)</td> <td>Per Parameter</td> <td>77.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MPN Coli (Fecal Coliform)</td> <td>Per Parameter</td> <td>119.000,00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>PEMERIKSAAN KIMIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Kelompok Sederhana</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Kelompok Sedang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Kelompok Canggih</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>PENGUJIAN KUALITAS UDARA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>PENGUJIAN KEBISINGAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kebisingan Lingkungan</td> <td>Per Titik</td> <td>37.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	I	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI			1	MPN Coliform (Total Coliform)	Per Parameter	77.000,00	2	MPN Coli (Fecal Coliform)	Per Parameter	119.000,00	II	PEMERIKSAAN KIMIA			A	Kelompok Sederhana			B	Kelompok Sedang			C	Kelompok Canggih			III	PENGUJIAN KUALITAS UDARA			IV	PENGUJIAN KEBISINGAN			1	Kebisingan Lingkungan	Per Titik	37.000,00		
NO	DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																													
I	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI																																															
1	MPN Coliform (Total Coliform)	Per Parameter	77.000,00																																													
2	MPN Coli (Fecal Coliform)	Per Parameter	119.000,00																																													
II	PEMERIKSAAN KIMIA																																															
A	Kelompok Sederhana																																															
B	Kelompok Sedang																																															
C	Kelompok Canggih																																															
III	PENGUJIAN KUALITAS UDARA																																															
IV	PENGUJIAN KEBISINGAN																																															
1	Kebisingan Lingkungan	Per Titik	37.000,00																																													
		<p>Pemanfaatan Aset Lab. Kesehatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Flouride</td> <td>Per Parameter</td> <td>44.880,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nitrite</td> <td>Per Parameter</td> <td>30.806,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Nitrate</td> <td>Per Parameter</td> <td>50.507,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dst. s.d. 24. Methanyl Yellow</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>Borax</td> <td>Per Parameter</td> <td>82.055,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan				1.	Flouride	Per Parameter	44.880,00	2.	Nitrite	Per Parameter	30.806,00	3.	Nitrate	Per Parameter	50.507,00	4.	Dst. s.d. 24. Methanyl Yellow			25.	Borax	Per Parameter	82.055,00	Direposisi	- Direposisi ke Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan																
NO	DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																													
Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan																																																
1.	Flouride	Per Parameter	44.880,00																																													
2.	Nitrite	Per Parameter	30.806,00																																													
3.	Nitrate	Per Parameter	50.507,00																																													
4.	Dst. s.d. 24. Methanyl Yellow																																															
25.	Borax	Per Parameter	82.055,00																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																
		4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT < tabel tarif > 5. ASET DAERAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN < tabel tarif > 6. ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH < tabel tarif > 7. ASET DAERAH BERUPA RUMAH DINAS < tabel tarif >	-	Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), (5), dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023.																																																																
		8. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH <table border="1" data-bbox="418 553 1241 1190"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Radiogram</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pemerintah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- 1 s/d 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- diatas 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Swasta</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- 1 s/d 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- diatas 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengumuman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pemerintah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- 1 s/d 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- diatas 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Swasta</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- 1 s/d 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- diatas 100 kata</td> <td>per hari 2 x siaran</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.	Radiogram				a. Pemerintah				- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	2.500,00		- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	5.000,00		b. Swasta				- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	5.000,00		- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	10.000,00					2.	Pengumuman				a. Pemerintah				- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	5.000,00		- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	7.500,00		b. Swasta				- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	7.500,00		- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	10.000,00					Direposisi ke Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	- Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), (5), dan Ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023.
1.	Radiogram																																																																			
	a. Pemerintah																																																																			
	- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	2.500,00																																																																	
	- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	5.000,00																																																																	
	b. Swasta																																																																			
	- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	5.000,00																																																																	
	- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	10.000,00																																																																	
2.	Pengumuman																																																																			
	a. Pemerintah																																																																			
	- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	5.000,00																																																																	
	- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	7.500,00																																																																	
	b. Swasta																																																																			
	- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran	7.500,00																																																																	
	- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran	10.000,00																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		3. Berita Keluarga		
		a. Biasa		
		- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran 5.000,00	
		- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran 7.500,00	
		b. Duka		
		- 1 s/d 100 kata	per hari 2 x siaran 2.500,00	
		- diatas 100 kata	per hari 2 x siaran 5.000,00	
		4. Iklan		
		Untuk 1 x permintaan		
		- 1 s/d 2 menit	per hari 2 x siaran 10.000,00	
		- s/d 5 menit	per hari 2 x siaran 15.000,00	
		Untuk masa siaran lebih dari 1 hari		
		- 1 minggu	per hari 2 x siaran 50.000,00	
		- 1 bulan	per hari 2 x siaran 150.000,00	
		5. Pilihan Pendengar	per hari 2 x siaran 1.000,00	
C. Retribusi Perizinan Tertentu				
		Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi: a. PBG; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat.	(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi: a. persetujuan bangunan gedung b. penggunaan tenaga kerja asing. c. dihapus (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	merupakan kewenangan provinsi. Ditambahkan ayat (2) sebagaimana rekomendasi.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2.	Objek Retribusi	Pasal 112	Pasal ...	
3.	Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</p> <p>e. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Telah sesuai</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. Telah sesuai</p> <p>b. Telah sesuai</p> <p>c. Dihapus</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks lokalitas 2. luas total lantai; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	<p>- Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUNomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP Nomor35 Tahun 2023.</p> <p>- Ilo yang berfungsi sebagaicost driver dan merupakan salah satu variabel dalam formula PBG seyogianya tidak dipandang sebagai harga satuan retribusi mengingat Ilo berupa nilai indeks bukan nominal rupiah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2a) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(2b) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SHST untuk Bangunan Gedung; atau 2. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023, dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</p>
	<p>Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung</p>	<p>LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p>A. RETRIBUSI PBG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG <ul style="list-style-type: none"> Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: 		<ul style="list-style-type: none"> - SHST yang berfungsi sebagai tarif pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung diatur dan ditetapkan pertama kali dalam Perda sesuai Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022. - Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		<p>Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:</p> $If \times \sum (b \times) \times F$ <p>a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp... (... rupiah)</p>	<p>lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan SHST dan HSpbg oleh Pemda sekitarnya.</p>												
	Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	<p>B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF^a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengesahan RPTKA perpanjangan</td> <td>per orang per bulan</td> <td>USD\$100</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF ^a	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD\$100	<p>B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengesahan RPTKA perpanjangan</td> <td>per orang per bulan</td> <td>USD\$100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan: Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.</p>	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD\$100	<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023, serta PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. - Ditambahkan keterangan kurs yang digunakan.</p>
JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF ^a														
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD\$100														
JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF														
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD\$100														

Catatan:

- Dalam rangka percepatan evaluasi raperda, pelaksanaan evaluasi Raperda PDRD oleh Kementerian Keuangan difokuskan terhadap muatan Raperda sesuai ketentuan pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, Perda harus mengatur ketentuan peralihan yang memuat ketentuan bahwa PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- Dalam menyediakan jenis pelayanan pemanfaatan aset daerah, Pemda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - Pemda dilarang menyediakan layanan di luar jenis pelayanan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022,

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>b. Pelayanan pemanfaatan aset daerah disediakan dalam rangka optimalisasi aset daerah yang <i>idle</i> sehingga pelayanan yang sejatinya disediakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah tidak dapat dikenakan pungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pemanfaatan aset daerah.</p> <p>c. Seluruh bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah dicatat sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>d. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pelayanan yang dilakukan oleh BLUD termasuk ke dalam jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Daerah. Maka, Raperda PDRD harus mengatur mengenai ketentuan pelayanan BLUD tersebut (meliputi : objek pelayanan dan pengecualiannya, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi atas pelayanan BLUD dan lain sebagainya)</p> <p>5. Dalam rangka pengawasan Perda PDRD, Pemerintah Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya.</p> <p>6. Dengan adanya rekomendasi untuk perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p> <p>7. Dalam rangka simplifikasi, efisiensi, dan kejelasan, sistematika Raperda disarankan untuk mengikuti sistematika contoh konsep raperda yang terlampir pada Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diunduh pada website DJPK.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
Pt. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>f</i>

